



Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Nurifa Laksmításari Azizah^[1], Imtiyaz Farras Mufidah^[2]

^{[1][2]}Universitas Selamat Sri

nurifalaksmításari@gmail.com^[1], imtyasfarras@gmail.com^[2]

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima pada 28 Februari 2023

Disetujui pada 13 Juli 2023

Dipublikasikan pada 30 Juni 2023

Kata Kunci:

Perencanaan pajak, Komite Audit, Audit Internal, Audit Eksternal, Agresivitas Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak. Karakteristik komite audit terdiri ukuran komite, proporsi perempuan dalam komite audit, independensi komite audit dan keahlian keuangan dan akuntansi komite audit. Sampel penelitian adalah 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya proporsi perempuan dalam komite audit saja yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Mengatur perekonomian Negara. Pemerintah telah menggunakan instrumen kebijakan pajak untuk mendorong industri dan pertumbuhan. Di sisi yang berlawanan, perpajakan dan kebijakan pajak merupakan bentuk disinsentif bagi perusahaan yang harus digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan maupun nilai bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut berarti bahwa pajak adalah sumber penting pendapatan pemerintah meskipun ada *trade-off* antara pajak penghasilan perusahaan dan investasi langsung (Laudage, 2020).

Perusahaan sebagai entitas bisnis akan berusaha memaksimalkan kekayaan pemegang saham sebagaimana dibebankan kepada manajer. Oleh karena itu, ketika menghadapi tujuan kinerja bisnis serta kebutuhan modal, penghindaran pajak merupakan cara yang sangat diperlukan dalam strategi manajemen, karena dari perspektif bisnis, pajak merupakan beban. Biaya besar dengan karakter wajib dikelola oleh jaringan hukum. Untuk itu, kegiatan pajak dalam penghindaran pajak menjadi semakin populer dengan meningkatnya kecanggihan dan kompleksitas di perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, banyak penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berhubungan dengan tata kelola perusahaan karena manajer selalu memiliki insentif untuk meminimalkan biaya pajak dan membantu peningkatan nilai perusahaan.

Disparitas nilai akuntansi pajak meningkat ketika manajer berusaha untuk meningkatkan laba

akuntansi tetapi bukan laba kena pajak dalam meminimalkan biaya pajak (Plesko, 2002). Fenomena ini dikatakan sebagai penerapan strategi perencanaan pajak oleh manajer. Selain itu, manajer perusahaan selalu memiliki insentif untuk meminimalkan biaya pajak penghasilan tetapi pada saat yang sama tetap ingin menunjukkan hasil usaha yang efektif melalui peningkatan laba setelah pajak dan membuatnya stabil dari waktu ke waktu untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Kegiatan ini meningkatkan kepatuhan perusahaan berisiko dan mempengaruhi APBN. Hal tersebut menjadi lebih penting di negara-negara berkembang ketika anggaran sangat terbatas dan kegiatan penghindaran pajak menjadi semakin canggih dan kompleks.

Penghindaran dan kepatuhan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai bisnis. *Agency theory* telah membantu menjelaskan bahwa manajer cenderung menghindari pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan dan juga untuk kepentingan pribadi mereka. Ketentuan pajak dalam hal tersebut telah menjadikan manajemen mencari cara untuk mengurangi biaya dalam meningkatkan kinerja organisasi diantaranya melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu metode strategis yang efektif, telah digunakan manajemen untuk mengurangi arus keluar sumber daya dari organisasi dengan membayar pajak serendah mungkin. Sebaliknya pemerintah ingin mengumpulkan pajak sebanyak mungkin. Dilema ini membuat masalah pajak menjadi kontroversial (Soetan & Oyetunji, 2018).

Penelitian mengenai keuangan perusahaan sering melihat bahwa kewajiban pajak hanya sebagai ketidaksempurnaan pasar yang mempengaruhi struktur modal dan kebijakan dividen, sedangkan peneliti keuangan publik juga tidak memasukan kemungkinan masalah yang direpresentasikan dalam analisis mereka sebelumnya. Di negara-negara berkembang, kode pajak sangat kompleks dan memudahkan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak (Khlif & Amara, 2019).

Menghadapi fenomena penghindaran pajak, para teoritis dan praktisi akuntansi percaya bahwa mekanisme tata kelola perusahaan umumnya berkontribusi untuk memecahkan masalah keagenan dan mengusulkan mekanisme tata kelola yang berbeda untuk membangun satu yang tepat pada perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan sendiri banyak berfokus pada pengendalian peran manajemen, struktur kepemilikan, pasar tenaga kerja, dan dewan direksi (Nguyen & Dang, 2020). Banyak penelitian yang meneliti mengenai tata kelola perusahaan telah mendokumentasikan efektivitas perusahaan yang dikendalikan oleh manajer yang baik. Mengingat pentingnya mekanisme kontrol perusahaan berkaitan dengan masalah keagenan, banyak ahli dan peneliti menghargai peran mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan dapat memastikan tanggung jawab manajer.

Pada tatanan yang lebih luas, otoritas di banyak negara telah mengeluarkan peraturan di bidang pasar modal yang berupa mewajibkan perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek untuk memiliki audit independen dan komite audit. Tidak hanya mereka faktor penting dalam struktur tata kelola, namun mereka juga mencerminkan pentingnya komite audit dalam fungsi-fungsi penting mekanisme tata kelola perusahaan. Fungsi utama komite audit adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan sistem kontrol (Oussii & Boulila Taktak, 2018). Keberadaan komite audit membuat laporan keuangan lebih handal. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa komite audit berkualitas tinggi dikombinasikan dengan auditor independen secara efektif memenuhi tugas utama mereka mengawasi proses pelaporan keuangan. Banyak literatur berpendapat bahwa komite audit adalah yang tertinggi dari pengendalian internal dan memiliki peran penting dalam mengendalikan sistem (Ashfaq & Rui, 2019).

Namun, meskipun pengendalian internal serta komite audit mungkin memiliki peran penting dalam pengawasan penghindaran pajak, masih belum banyak penelitian yang menyelidiki hubungan antara struktur komite audit dan penghindaran pajak. Tjondro & Olivia, (2018) dalam penelitiannya melaporkan hasil bahwa komite audit memiliki hubungan dengan *trade-off* antara penghindaran pajak dan biaya utang. Berkaitan dengan peran komite audit dalam tata kelola perusahaan, banyak penelitian

menemukan bahwa komite audit dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Oussii & Boulila Taktak, 2018). Komite audit juga dapat mempengaruhi dalam pengurangan risiko bank dan menjaga stabilitas perusahaan (Nguyen & Dang, 2020) dan juga dapat mempengaruhi secara positif terhadap kinerja perusahaan (Shanti, 2020). Namun demikian banyak pula penelitian yang menemukan bahwa keberadaan jumlah anggota komite audit dalam ukuran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Permatalia & Haryono, 2021); dan juga tidak signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan (Hartati *et al.*, 2019). Namun, demikian tidak banyak penelitian yang menyelidiki mengenai peran komite audit dalam membatasi penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, penelitian ini memperluas literatur dengan meneliti mengenai dampak dari karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak di negara berkembang. Penghindaran pajak sendiri bagaimanapun masih merupakan area yang belum jelas manfaatnya bagi pemegang saham karena lebih memberikan manfaat bagi *stakeholder* lain yaitu negara. Terlebih lagi pengaruh ukuran komite audit yang tidak konsisten dalam mendukung prinsip mekanisme tata kelola perusahaan maka menjadikan peneliti mengeksplorasi aspek komite audit tidak hanya pada ukuran atau jumlah keanggotaan komite audit saja namun pada lebih banyak karakteristik lain untuk digunakan sebagai aspek mekanisme GCG khususnya yang berkaitan dengan komite audit.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Masalah penghindaran pajak dan faktor yang mempengaruhinya banyak berkaitan dengan masalah transparansi perusahaan sehingga banyak penelitian sebelumnya memasukkan GCG sebagai prediktor dari penghindaran pajak. Mekanisme GCG di Indonesia menggunakan *Two-Tier Board System* yang memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan atau manajemen dalam struktur perusahaan. Namun dikarenakan luasnya mekanisme GCG maka penelitian ini akan berfokus pada penggunaan variabel karakteristik komite audit yang merupakan salah satu bagian dalam mekanisme GCG. Komite audit memiliki peranan dalam pengawasan perusahaan dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berdasarkan perspektif teori keagenan, penghindaran pajak membutuhkan pertimbangan manajemen. Menurut Bimo, Prasetyo and Susilandari (2019) bahwa dalam pelaksanaannya, manajemen dihadapkan pada tantangan seperti kompleksitas dan kebijakan. Melalui kebijakan ini, manajemen memiliki insentif untuk melaksanakan penghindaran pajak yang menguntungkan manajemen melalui peningkatan kompensasi dengan mengorbankan pemegang saham. Untuk ini pengendalian internal adalah mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Berkaitan dengan penghindaran pajak, pengendalian internal dari komite audit yang efektif mengurangi kesalahan manajemen ketika manajemen membuat keputusan dan memperkirakan kebijakan pajak perusahaan. Pengendalian internal dari komite audit juga memastikan bahwa manajemen tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rae *et al.*, 2017).

Ketika sebuah perusahaan memutuskan apakah akan menerapkan penghindaran pajak, maka manajer harus mempertimbangkan banyak hal berkaitan dengan manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya. Kemudian ketika menerapkan perilaku penghindaran pajak, manajer mempertimbangkan manfaat yang dicapai, meliputi manfaat yang diterima manajer (penghargaan, promosi) versus biaya yang mungkin timbul (biaya audit, denda, kerusakan reputasi). Dengan demikian, perilaku penghindaran pajak terutama tergantung pada agen (manajer) serta sistem kontrol untuk mengawasi keputusan manajer (yaitu pengendalian internal). Keberadaan komite audit dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan menganggapnya sebagai alat pengawasan yang efektif

untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi. Dewan direksi dan komite audit merupakan mekanisme pemantauan internal yang penting. Nguyen & Dang (2020) mengungkapkan bahwa efektivitas komite audit bergantung pada beberapa karakteristik komite audit, antara lain memiliki anggota yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi, frekuensi pertemuan komite audit, persentase anggota independen, jenis kelamin dan ukuran komite audit.

Guna mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan diharuskan memiliki komite audit yang menerapkan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas. Komite audit bertugas mengendalikan proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Direksi wajib membentuk komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang diangkat atau diberhentikan oleh dewan komisaris, dan mereka juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Namun, komite audit yang besar mungkin tidak meningkatkan efektivitasnya. Direksi di dewan besar juga mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mengungkapkan pendapat mereka dalam waktu terbatas yang tersedia selama rapat dewan. Penelitian Nguyen & Dang (2020) menunjukkan bahwa ukuran komite audit meningkatkan risiko bank karena rendahnya efektivitas. Penelitian S.T. Tahilia *et al.*, (2022) mendapatkan bahwa ukuran komite audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan argumen tersebut, kami mengajukan hipotesis terkait dengan ukuran komite audit sebagai berikut:

H1: Ukuran komite audit memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya telah menekankan bahwa seorang pengambil keputusan pada umumnya dikelompokkan ke dalam dua karakteristik yaitu pengambil risiko dan penghindari risiko (Tandean & Winnie, 2016). Wanita umumnya dianggap lebih menghindari risiko dibandingkan pria dan cenderung membuat keputusan dengan hati-hati. Dalam mendukung pandangan ini, penelitian sebelumnya menemukan bahwa anggota perempuan di dewan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Ararat & Yurtoglu, 2021). Penelitian Manuela & Sandra, (2022) menemukan bahwa anggota perempuan dalam komite audit maupun dewan direksi mampu mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Menurut temuan dari penelitian sebelumnya, kami memperkirakan bahwa perempuan dalam komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit dan membatasi penghindaran pajak. Dengan demikian, kami mengajukan hipotesis H2 sebagai berikut:

H2: Proporsi anggota perempuan dalam komite audit memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak.

Guna memenuhi peran pengawasan dan perlindungan kepentingan pemegang saham, komite audit harus independen dari manajemen. Komite audit independen dinilai akan dapat menilai secara lebih objektif dalam pengendalian internal dan pengungkapan informasi keuangan. Hal tersebut tentunya juga dapat mengurangi manajemen laba, mengurangi kemungkinan penyajian kembali dan kecil kemungkinannya untuk dikenai sanksi atas penipuan atau akuntansi yang agresif. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit independen adalah tata kelola yang sukses berdasarkan mekanisme yang dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan (Deslandes *et al.*, 2020).

Penelitian telah menunjukkan bahwa independensi komite audit meningkatkan pemantauan informasi keuangan dan diperlukan untuk manajemen risiko pajak, karena tidak independen anggota komite audit mungkin ingin meminimalkan pajak untuk meningkatkan laba bersih dan harga saham.

Independen keanggotaan komite audit dianggap sangat penting dalam tata kelola perusahaan dalam literatur. Tandean & Winnie (2016) berpendapat bahwa anggota independen dapat membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan mengevaluasi implementasi strategi secara berkala untuk mengurangi tindakan terkait penghindaran pajak.

Penelitian Amin (2016) melaporkan bahwa independensi komite audit dapat meningkatkan kualitas laba. Karena komite audit terdiri dari anggota dewan, dan mengingat itu komite-komite ini bersifat wajib bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan merupakan suatu mekanisme yang efisien untuk memantau risiko pajak, anggota komite audit independen harus membantu mengurangi agresivitas pajak (Deslandes *et al.*, 2020).

Sesuai dengan yang diharapkan, maka diusulkan hipotesis H3 terkait independensi komite audit sebagai berikut:

H3: Persentase anggota independen dalam komite audit berhubungan negatif dengan penghindaran pajak.

Karakteristik lainnya dari komite audit adalah keahlian di bidang keuangan. Ini dapat diperoleh melalui pengalaman dalam urusan keuangan, jabatan direktur atau keanggotaan di dewan lain dan masa jabatan. Kehadiran anggota dengan keahlian keuangan memungkinkan komite audit untuk menjalankan peran pengawasannya dengan lebih baik dengan mengurangi potensi manajemen laba dan mengurangi probabilitas penyajian kembali (Deslandes *et al.*, 2020).

Penelitian Wilbanks *et al.* (2017) menemukan bahwa anggota dengan pengalaman profesional sebagai pengendali perusahaan mengambil lebih banyak tindakan untuk menilai risiko dan manajemen pelaporan keuangan yang curang integritas dimana anggota komite audit dengan pengalaman akuntansi lebih menyeluruh ketika menyelidiki keputusan akuntansi yang agresif. Untuk ini, perusahaan perlu memilih sekelompok ahli dengan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi untuk bergabung dengan komite audit (Tandean & Winnie, 2016). Komite audit kemudian diberi wewenang untuk bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola perusahaan adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan di bidang keuangan dan akuntansi. Oleh karena itu, pemilihan profesional keuangan dan akuntansi pada komite audit membuat pelaksanaannya lebih independen dari auditor. Tabrakan antara manajemen dan profesional keuangan dan akuntansi menjadi lebih sulit, yang mengurangi tindakan penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Untuk ini diajukan hipotesis H4 terkait keahlian keuangan dan akuntansi dalam komite audit sebagai berikut:

H4: Proporsi ahli keuangan dan akuntansi dalam komite audit berhubungan negatif dengan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Model empiris

Berdasarkan teori keagenan, model empiris memiliki bentuk:

$$TAVOID = \beta_1 ACSIZE + \beta_2 ACGEND + \beta_3 ACIND + \beta_4 ACEX + \beta_5 CONTROL + \varepsilon$$

Variabel dependen adalah TAVOID yaitu *tax avoidance*. Penelitian ini mengukur perilaku penghindaran pajak berdasarkan tarif pajak efektif (ETR). ETR didasarkan pada gagasan bahwa manajer sadar bahwa perencanaan pajak yang efektif memiliki potensi untuk mengurangi biaya pajak. Praktek

menunjukkan bahwa pengukuran dengan ETR mencerminkan strategi untuk menghindari pajak, menunda beban pajak yang terutang ke periode selanjutnya, tetapi tidak mempengaruhi beban pajak penghasilan badan kini pada pernyataan laporan keuangan. Selain itu, ETR juga tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan perpajakan sehingga memberikan informasi yang akurat

Karakteristik komite audit dalam penelitian ini menggunakan empat karakteristik komite audit termasuk ukuran komite audit (ACSIZE), persentase anggota perempuan dalam komite audit (ACGEND), persentase anggota independen pada komite audit (ACIND), dan proporsi ahli keuangan dan akuntansi pada komite audit (ACEXP). Pemilihan karakteristik komite audit didasarkan pada studi sebelumnya dan sumber data yang dapat dimanfaatkan.

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk model termasuk ukuran perusahaan yaitu : kualitas audit independen; rasio *leverage* dan profitabilitas ROA dan ukuran perusahaan. Semua variabel dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran
Penghindaran pajak	
ETR	Pajak / Laba sebelum pajak
Karakteristik komite audit	
ACSIZE	Jumlah anggota komite audit
ACGEND	Anggota perempuan / Jumlah komite audit
ACIND	Anggota komite audit independen / Jumlah Komite Audit
ACEXP	Ahli keuangan dan akuntansi dalam komite audit / Jumlah Komite Audit
Variabel kontrol	
KAP	Kualitas Auditor : 1 untuk KAP Big 4 dan 0 untuk KAP Non Big
<i>Leverage</i> (LEV)	Total Hutang / Total Aset
ROA	Laba Sebelum Pajak / Total Aset
SIZE	Ukuran perusahaan: Logaritma dari total aset perusahaan

Data

Data penelitian awal terdiri dari 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2020. Penggunaan data hingga tahun 2020 saja adalah karena tahun 2021 terjadi penurunan kondisi perekonomian sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian

Metode estimasi

Penelitian ini menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS) untuk data *cross section* yang sebelumnya menggunakan pengujian asumsi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Sampel awal penelitian ini adalah sebanyak 225 data pengamatan dari 75 perusahaan sampel dengan pengamatan selama 3 tahun berturut-turut. Namun demikian jumlah tersebut mengalami pengurangan dengan mengikuti prosedur penelitian untuk mendapatkan data yang terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi lainnya sehingga data yang dijadikan untuk pengujian hipotesis adalah sebanyak 188 data pengamatan

Tabel 2 Statistik Deskriptif Data Penelitian

	Obs	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACSIZE	188	2.0000	4.0000	3.0532	0.2876
ACGEND	188	0.0000	1.0000	0.1862	0.2161
ACIND	188	0.7500	1.0000	0.9960	0.0314
ACEXP	188	0.2500	1.3333	0.6476	0.1748
KAP	188	0.0000	1.0000	0.4100	0.4930
LEV	188	0.0168	0.9145	0.3901	0.1790
ROA	188	0.0025	0.6242	0.1182	0.1020
SIZE	188	25.9547	33.4945	28.9924	1.6182
ETR	188	0.0795	0.3828	0.2473	0.0552

Tabel 2 menyajikan ringkasan statistik dari semua variabel. Rerata ETR lebih tinggi dari 0,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak di negara berkembang seperti Indonesia terjadi. Rata-rata ukuran komite audit adalah 3,5. Ini nampaknya bahwa banyak perusahaan sudah memenuhi syarat jumlah komite audit yang harus dimiliki perusahaan. Selain itu, rata-rata ACGEND cukup rendah yaitu 0.1862. Hal tersebut menyiratkan bahwa proporsi anggota perempuan masih relatif kecil yaitu kurang dari sepertiga dari seluruh anggota komite audit. Variabel ACIND menunjukkan sebesar 0.9960 yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anggota komite audit adalah individu yang tidak terikat dengan perusahaan maupun pengurus perusahaan. Namun, rata-rata ACEXP lebih tinggi dari 0.50 yang menunjukkan bahwa anggota komite audit sebagian besar sudah memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 3 melaporkan hasil persamaan yang meneliti hubungan antara karakteristik komite audit dan penghindaran pajak.

Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis

	Koef	t	sig
(Constant)	0.445	2.186	0.030
ACSIZE	0.002	0.106	0.916
ACGEND	-0.042	-2.203	0.029
ACIND	-0.019	-0.132	0.895
ACEXP	-0.022	-0.908	0.365
KAP	0.026	2.690	0.008
LEV	0.062	2.586	0.011

ROA	-0.059	-1.408	0.161
SIZE	-0.007	-2.185	0.030
F	2.167		
Sig F	0.032		
Adj R2	0.048		

Hasil analisis Regresi melaporkan bahwa koefisien ACSIZE negatif dan tidak signifikan terhadap statistik ETR. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak dapat menurunkan penghindaran pajak dan tidak mendukung hipotesis H1. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya. Ukuran komite audit tidak dapat mengurangi efektivitas komite audit dan karenanya peran dari komite audit yang banyak masih kurang dalam membatasi penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan ukuran yang besar membuat komite audit menjadi lebih kompleks dan mengurangi efektivitasnya dalam pengambilan keputusan.

Berlawanan dengan yang diharapkan, hasil koefisien ACGEND diperoleh memiliki arah negatif dan signifikan terhadap ETR. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota komite audit perempuan tidak dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam membatasi penghindaran pajak. Sementara Deslandes *et al.*, (2020) juga tidak menemukan bukti bahwa perempuan dalam komite audit dapat membatasi penghindaran pajak perusahaan. Temuan kami menyiratkan bahwa masalah budaya negara mungkin memberikan hasil yang berbeda.

Penelitian ini tidak menemukan bukti kuat bahwa independensi komite audit dapat mengurangi penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Deslandes *et al.*, (2020) maupun Nguyen (2029) yang menemukan bahwa independensi meningkatkan efektivitas komite audit. Hal tersebut mungkin dapat dikarenakan bahwa dalam mengendalikan penghindaran pajak, anggota komite audit harus memahami manajemen perusahaan dengan jelas sehingga anggota luar mungkin tidak memiliki keuntungan untuk melakukannya. Dengan demikian, hasil ini tidak mendukung hipotesis H3.

Hasil pengujian pada variabel ACEXP diperoleh memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan terhadap ETR. Hal tersebut menunjukkan bahwa pakar akuntansi dan keuangan di komite audit juga belum dapat membatasi perilaku penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak sering dilakukan melalui kegiatan manajemen laba ketika manajer berusaha untuk meningkatkan laba akuntansi tetapi bukan laba kena pajak untuk meminimalkan biaya pajak. Dengan tidak diperolehnya hasil yang signifikan, hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit dengan lebih banyak ahli akuntansi dan keuangan kurang dapat melakukan kontrol terhadap penghindaran pajak secara lebih baik. Selain itu, benturan antara manajemen dan profesional keuangan dan akuntansi menjadi lebih sulit, yang mengurangi tindakan penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Hasil ini tidak mendukung hipotesis H4. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa komite audit belum memiliki peran optimal dalam membatasi perilaku penghindaran pajak.

Selain variabel utama, hasil dari beberapa variabel kontrol juga memberikan beberapa temuan menarik. Koefisien pada kualitas KAP berpengaruh signifikan menghambat penghindaran pajak. Literatur menemukan bahwa peran utama audit eksternal adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah manajemen laba. Selain itu, audit eksternal dapat meningkatkan tata kelola perusahaan internal perusahaan. Temuan ini memberikan beberapa implikasi bahwa perusahaan besar harus fokus pada karakteristik komite audit dan mempertimbangkan untuk menggunakan jasa audit eksternal dengan kualitas tinggi.

Temuan pengaruh *leverage* diperoleh juga signifikan dalam meningkatkan penghindaran pajak. Hal tersebut mengesankan bahwa pengurangan pajak juga dilakukan untuk keperluan pembayaran bunga dan pokok hutang perusahaan. Koefisien SIZE adalah negatif dan signifikan terhadap ETR. Hal tersebut menyiratkan bahwa ukuran perusahaan dapat meningkatkan penghindaran pajak. Temuan ini juga mendukung penelitian sebelumnya dimana perusahaan besar memiliki efektivitas sistem pengendalian yang rendah sehingga dapat meningkatkan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Konteks aktivitas penghindaran pajak menjadi semakin canggih dan kompleks. Berdasarkan teori keagenan, penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik komite audit dengan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Dengan menggunakan data 75 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2020, Penelitian ini menemukan bukti bahwa peran karakteristik komite audit belum maksimal dalam menghambat perilaku penghindaran pajak.

Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, proporsi anggota perempuan diperoleh justru cenderung mendorong penghindaran pajak, sementara ahli keuangan dan akuntansi di komite audit juga tidak dapat membatasi perilaku penghindaran pajak.

Meskipun hasil temuan penelitian ini banyak yang tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya bahwa struktur komite audit akan meningkatkan efektivitasnya, namun penelitian ini menambah literatur tentang peran komite audit masih tergantung pada budaya suatu negara. Selain itu, temuan kami memberikan beberapa implikasi kebijakan penting bagi pemegang saham dan regulator. Pertama, pemegang saham harus menyelidiki karakteristik komite audit untuk mengelola kegiatan penghindaran pajak. Kedua, regulator harus memberikan perhatian khusus kepada perusahaan besar yang terdaftar dengan komite audit yang besar atau proporsi anggota perempuan yang rendah, ahli keuangan dan akuntansi di komite audit karena potensi penghindaran pajak yang tinggi. Penghindaran pajak merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemegang saham karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan mereka. Meskipun penghindaran pajak dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka pendek, namun memiliki risiko dalam jangka panjang karena dapat bersifat ilegal. Ketika pemilik perusahaan memutuskan apakah akan menerima perilaku penghindaran pajak, mereka harus mempertimbangkan berbagai masalah yang berkaitan dengan manfaat, biaya, dan risiko yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemilik perusahaan yang ingin mengendalikan kegiatan penghindaran pajak perlu memperhatikan karakteristik komite audit, seperti jenis kelamin dan ukuran komite, jumlah anggota independen, ahli keuangan dan akuntansi. Karena perusahaan yang terdaftar di Indonesia mempublikasikan lebih sedikit informasi tentang komite audit dalam Annual report perusahaan, maka penelitian ini hanya berfokus pada empat karakteristik komite audit. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lebih banyak karakteristik komite audit lain yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. (2016). Independensi Komite Audit, Kualitas Audit dan Kualitas Laba: Bukti Empiris Perusahaan dengan Kepemilikan Terkonsentrasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.1-14>
- Ararat, M., & Yurtoglu, B. B. (2021). Female directors, board committees, and firm performance: Time-series evidence from Turkey. *Emerging Markets Review*, 48, 100768. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100768>

- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Hartati, D. R., Syofyan, E., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Modal Intelektual (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1465. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104569>
- Khlif, H., & Amara, I. (2019). Political connections, corruption and tax evasion: a cross-country investigation. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 401–411. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0004>
- Laudage, S. (2020). *Corporate tax revenue and foreign direct investment: Potential trade-offs and how to address them Discussion*.
- Manuela, A., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>
- Nguyen, Q. K., & Dang, V. C. (2020). Audit committee structure and bank stability in Vietnam. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 8(1), 240–255. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2019.8.1.015>
- Oussii, A. A., & Boulila Taktak, N. (2018). Audit committee effectiveness and financial reporting timeliness: The case of Tunisian listed companies. *African Journal of Economic and Management Studies*, 9(1), 34–55. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-11-2016-0163>
- Permatalia, R., & Haryono, S. (2021). Pengaruh Kualitas Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan. *Al-Intaj*, 7(2).
- Plesko, G. A. (2002). Reconciling Corporation Book and Tax Net Income, Tax Years 1996-1998. *SOI Bulletin*, 21(4), 1–16. <https://pdfs.semanticscholar.org/df93/b5497f0f016a1f1bc7adcbcd34ca907cdb11.pdf>
- Rae, K., Sands, J., & Subramaniam, N. (2017). Associations among the Five Components within COSO Internal Control-Integrated Framework as the Underpinning of Quality Corporate Governance. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(1), 28–54. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i1.4>
- Shanti, Y. K. (2020). Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Dewan Komisaris Sebagai Variabel Intervening. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v3i2.59311>
- Soetan, T., & Oyetunji, O. (2018). Tax Planning for Organization Survival: How Relevant is Accounting Theory. *International Journal of Innovative Science and ...*, 3(8). <https://ijisrt.com/wp-content/uploads/2018/08/Tax-Planning-for-Organization-Survival-How-Relevant-is-Accounting-Theory.pdf>
- Tahilia, A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Tjondro, E., & Olivia, V. (2018). Role of Audit Committee in Tax Avoidance of Family and Non-Family Firms: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 1(3), 368–380. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.01.03.34>
- Wilbanks, R. M., Hermanson, D. R., & Sharma, V. D. (2017). Audit committee oversight of fraud risk: The role of social ties, professional ties, and governance characteristics. *Accounting Horizons*, 31(3), 21–38. <https://doi.org/10.2308/acch-51695>